



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Ketaatan Aturan, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara ketaatan aturan, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Ketaatan aturan, komitmen organisasi dan budaya organisasi memiliki pengaruh sebesar 21,9% terhadap kecenderungan kecurangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan



sisanya sebesar 78,1% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan:

1. Sebaiknya pegawai pemerintah khususnya pada bagian keuangan yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengurangi tingkat resiko kecurangan yang terjadi maka dapat meningkatkan ketaatan terhadap aturan akuntansi atau SAK dan nilai-nilai moral dalam penyusunan keuangan secara jujur dan transparan hal ini dapat mencegah adanya tindakan dari pemalsuan, manipulasi dan adanya perubahan dalam pencatatan keuangan.
2. Sebaiknya pegawai pemerintah khususnya pada bagian keuangan yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki komitmen yang tinggi di organisasi seperti tidak terpengaruh terhadap adanya berbagai macam imbalan yang akan didapat sehingga bisa menimbulkan adanya perubahan-perubahan di laporan keuangan dan tidak lagi dapat menjalankan komitmen sebagai pegawai yang jujur.
3. Sebaiknya pegawai pemerintah khususnya pada bagian keuangan yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki budaya organisasi yang memiliki tingkat kejujuran dan rasa malu yang tinggi jika melakukan kecurangan terhadap penyusunan laporan keuangan, sehingga hal tersebut akan mengurangi tindakan yang menimbulkan kecurangan dalam laporan keuangan.